



# RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUNA 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2023, yang didalamnya mengandung penjabaran tentang kebijakan strategis dan operasional dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan ini memberikan panduan dan pedoman bagi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP dalam menjalankan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2023.

Adapun pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini adalah pelaksanaan program, output dan kegiatan-kegiatan prioritas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui uraian pokok bahasan tersebut diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mempedomaninya secara cermat sekaligus memberikan saran dan masukan yang bermanfaat serta dasar pelaksanaan evaluasi kinerja.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini.

Tahuna, 30 Januari 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Tahuna



**Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si**

NIP. 19850616 200701 1 003

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	0
DAFTAR ISI .....	15
BAB I PENDAHULUAN .....	16
A. Latar Belakang .....	16
B. Maksud dan Tujuan .....	16
C. Struktur Organisasi .....	17
D. Sistematika Penyajian .....	18
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022 .....	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	19
B. Evaluasi Kinerja Tahun 2022.....	21
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023 .....	23
A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2023.....	23
B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	23
C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2023.....	24
D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 .....	26
BAB IV PENUTUP .....	31
LAMPIRAN .....	33

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 33/MEN/2016 tanggal 28 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Philipina. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna membutuhkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, menggambarkan pedoman kinerja tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode yang sama.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2023 dimaksudkan memberikan acuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam menselaraskan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2023, adalah :

- 1) Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi;

- 3) Memberikan arah dan kebijakan operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode tahun 2023.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.33/MEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, membawahi Pelaksana Koordinasi Kelompok Urusan Tata Usaha; Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; Pelaksana Koordinasi Kelompok Urusan Sarana dan Prasarana serta membawahi kelompok Jabatan Fungsional. Berikut tugas dan kewenangan masing-masing :

1. *Kepala Stasiun* : merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna untuk mencapai kelancaran tugas.
2. *Kepala Urusan Umum*: menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
3. *Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran*: melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. *Pelaksana Koordinasi Kelompok Urusan Sarana dan Prasarana*: melaksanakan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana prasarana pengawasan, perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
5. *Kelompok Jabatan Fungsional* : melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA  
TAHUN 2023**



*Gambar Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna*

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2023, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

2. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Menjelaskan tentang capaian program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

3. Bab III Rencana Kerja

Menjelaskan tentang rencana kerja program dan kegiatan tahun 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2023.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Stasiun PSDKP Tahuna sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hirarki UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Maka secara runut dijelaskan perubahan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna sepanjang tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan [%];	100	100
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan [%];	100	100
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	3. Indeks kinerja operasional kapal pengawas [%];	85	94
		4. Indeks kinerja operasional speedboat pengawas [indeks];	85	100
		5. Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP [indeks]	90	90
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6. Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP [%];	100	100
5	Terselenggaranya penanganan pelanggaran	7. Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan	93	97,50

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
	bidang kelautan dan perikanan	tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];		
		8. Persentase efektivitas penyelesaian penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	93	97,50
		9. Persentase efektivitas penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	93	97,50
		10. Persentase efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80	100
		11. Persentase efektivitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80	87,83
7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks];	80	91,79
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	75	89,91
		14. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks]	77	80,17
		15. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai];	90	97,20
		16. Nilai implementasi program budaya kerja [nilai];	21	27,34

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
		17. Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik [unit];	1	1
		18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	75	100
		19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	75	100
		20. Persentase unit kerja yang menerapkan pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	86	100
		21. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	70	100
		22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai];	89,00	98,19
		23. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai]	81,00	91,43

Tabel Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2022

## B. Evaluasi Kinerja Tahun 2022

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki visi "Peningkatan Kualitas Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif di Stasiun PSDKP Tahuna untuk mewujudkan

---

pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.” Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna terhadap perekonomian lokal dan nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna. Pelaporan tersebut sebagai dasar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

Total anggaran tahun 2022 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp.15.110.221.000,- (Lima belas milyar seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dari jumlah pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.15.076.160.239,- atau 99,77 %.

---

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023**

#### ***A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2023.***

Sebagai pelaksana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan penelaahan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada kegiatan prioritas nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaannya tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan sebagai stakeholder dalam kegiatan pengawasan.

#### ***B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.***

Dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa informasi terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP yaitu;

- 1) Bidang Perikanan Tangkap;
  - Terdapat peningkatan IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna selama 2 tahun terakhir;
  - Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI-Filipina;
- 2) Bidang Perikanan Budidaya;
  - Masih adanya unit budidaya ikan yang belum terdaftar / teregistrasi;
  - Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
- 3) Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
  - Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar / teregistrasi;
  - Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang diperiksa.
- 4) Bidang Distribusi Hasil Perikanan;
  - Kegiatan distribusi yang belum terekplor secara menyeluruh;
- 5) Bidang Jasa Kelautan dan Destructive Fishing;

- Penambangan pasir laut tanpa izin resmi dari pemerintah pusat;
- Kegiatan perikanan yang bersifat merusak, seperti penyetruman ikan, pembiusan ikan dan penggunaan alat bantu kompresor dalam penangkapan ikan;
- Belum optimalnya kegiatan pemanfaatan pada BMKT di sekitar lokasi;
- Belum terlaksananya pengawasan pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2023

Sesuai dengan arah kebijakan, strategi pelaksanaan pengawasan serta kegiatan prioritas nasional bidang Kelautan dan Perikanan yang perlu diwujudkan pada tahun 2023, maka terdapat 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan.

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
2350	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan		10.702.347
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	120 Hari Operasi	7.952.247
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	2.750.100
2351	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		320.800
2351.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	50.000
2351.BCE	Penanganan Perkara	7 Perkara	270.800
2352	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		593.697
2352.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	1 Unit	50.000
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24 Lembaga	543.697
2353	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		250.000
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10 Lembaga	250.000
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		7.519.949
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		7.519.949
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	6.789.583
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	18 Unit	173.200
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM	36 Orang	100.000

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen	457.166

Tabel Program, Aktivitas dan KRO Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023

Berdasarkan tabel redesain program, aktivitas dan anggaran tahun 2023 di atas, maka disusunlah Sasaran Kinerja dan Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna 2020-2024, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berikut penjabaran sasaran kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
SK1.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas [Indeks]	87,6
		ISK1.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [Indeks]	87,6
SK1.2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.2.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan [%]	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan [%]	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	93
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	80
		ISK5.1.2	Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	75
		ISK5.1.3	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	78
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	90
		ISK5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%]	75
		ISK5.1.7	Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai]	21
		ISK5.1.8	Jumlah inovasi yang dihasilkan [Inovasi]	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	92
		ISK5.1.10	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5
		ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	89
		ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	82

#### **D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Kegiatan 2023**

Berdasarkan dokumen kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2023, terdapat 5 (enam) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator kegiatan yang meliputi:

##### *1. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif.*

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini terdiri dari:

- a) Indeks kinerja operasi kapal pengawas dengan target 87,6 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas Hiu 15 untuk 90 Hari Operasi;
- b) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dengan target 87,6 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas Napoleon 017 dan Napoleon 039 untuk 30 Hari Operasi masing-masing unit;

##### *2. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 100% yang didapat dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 3 (tiga) unit armada pengawasan;

##### *3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan.*

---

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target 100% yang didapat dari pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk 24 Lembaga atau pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Kepulauan Talaud;

4. *Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target 100 % yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun objek pengawasan yang menjadi target adalah 10 (sepuluh) lembaga atau pelaku usaha perikanan;

5. *Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 80% untuk pelaksanaan penanganan 5 (lima) perkara sanksi administratif;

6. *Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 93% untuk pelaksanaan penanganan 2 (dua) perkara;

7. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik.*

Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan ini ada 13 (dua belas) komponen indikator yaitu:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan dengan indeks target 80 (delapan puluh). IK ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. Survey dilakukan selama 4 (empat) kali yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun 2023;
- b) Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 75% meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas serta peningkatan pelayanan publik;
- c) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 100%;
- d) Indeks Profesionalitas ASN dengan indeks target 78 (tujuh puluh delapan) yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap ASN dalam

---

melaksanakan tugas dan jabatannya. Sumber data yang menjadi instrumen pencapaian adalah aplikasi SIMPEG dan e-SKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;

- e) Nilai rekonsiliasi kinerja dengan target nilai 90 (sembilan puluh) yang merupakan rangkaian catatan informasi untuk verifikasi pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja UPT. Terdapat 3 (tiga) aspek penilaian, aspek kepatuhan, aspek kesesuaian dan aspek ketercapaian;
- f) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 75%
- g) Nilai implementasi program budaya kerja dengan target 21, merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan satker, hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker;
- h) Jumlah inovasi yang dihasilkan dengan target 1 inovasi;
- i) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar dengan target tahun 2023 sebesar 92%. IK ini adalah rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari;
- j) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan target 77,5% yang merupakan gambaran tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN, usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal, penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali, pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal periode tahun sebelumnya dan penyusunan Laporan BMN;
- k) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa dengan target 77,5% yang merupakan gambaran tingkat kepatuhan UPT dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dari Rencana Umum Pengadaan, persentase jumlah pengadaan belanja modal dan kesesuaian tahap pelaksanaan.
- l) Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 89 %. Capaian indikator kinerja ini adalah proses evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi. Sumber data untuk instrumen nilai berasal dari website online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Kementerian Keuangan RI.

---

m) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan target ditahun 2023 adalah 82. Capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan nilai realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber data perhitungan capaian indikator ini berasal dari aplikasi SMART Kemenkeu.

Rencana aksi atas kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Rencana Aksi Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023 pada lampiran.

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2023 ini disusun dengan menjabarkan secara detail dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Ditjen PSDKP di tahun 2023 dan khususnya dukungan terhadap pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP tahun 2020-2024.

Perlu disadari bahwa keberhasilan program dan kegiatan pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna merupakan *resultante* dari keberhasilan bersama sebagai stakeholder pengawasan perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023, sehingga hasilnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaannya.

---

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fokus dan Jadwal Kegiatan Stasiun PSDKP Tahun 2022

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN												
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
<b>JUMLAH</b>			<b>19.386.793</b>													
'032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		11.866.844													
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan		10.702.347													
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	120 HO	7.952.247													
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas		7.482.267													
'051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas		6.480	√												
'052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas		7.469.307	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas		6.480							√						√
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas		469.980													
'051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas		8.500	√												
'052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas		452.980	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas		8.500							√						√
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 UNIT	2.750.100													
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat		2.750.100													
'051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		800	√	√											
'052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		2.748.500	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		800							√					√	√
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		232.435													
2351.AEA	Koordinasi	1 KEG	50.000													
2351.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		50.000													
'052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		50.000					√								
2351.BCE	Penanganan Perkara	7 PERKARA	270.800													
2351.BCE.U02	Perkara TPKP Sedang yang Ditangani		170.800													
'051	Ekspose Awal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang		4.140	√				√								
'052	Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang		57.250	√				√								
'053	Gelar Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang		11.340	√				√								
'054	Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang		28.470	√				√								
'055	Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang		69.600	√				√								
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif		100.000													
'051	Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif		6.000												√	
'052	Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif		84.000												√	
'053	Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif		10.000												√	
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		593.697													
2352.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	1 UNIT	50.000													
2352.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan		50.000													
'051	Pelaksanaan kegiatan pengadaan jumlah alat selam, drone bawah laut dan ROV yang diadakan		50.000	√												

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN												
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24 LEMBAGA	543.697													
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		465.697													
051	Perencanaan / persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		15.600	√												
052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		92.737	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		7.360												√	√
054	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)		350.000												√	√
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak		78.000													
'051	Perencanaan/persiapan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak		8.160	√	√											
'052	Pelaksanaan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak		58.800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Konsolidasi data dan pelaporan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak		11.040								√				√	√
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		250.000													
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10 LEMBAGA	250.000													
2353.QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		136.000													
'051	Perencanaan / persiapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		13.485	√	√											
'052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		77.950	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		8.565								√				√	√
054	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut (ABT)		150.000												√	√
'032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		7.519.949													
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		7.519.949													
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 LAYANAN	6.789.583													
2355.EBA.956	Layanan BMN		45.000													
'051	Perencanaan Pengelolaan BMN		45.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		46.600													
051	Perencanaan Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		3.100													
'052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat		43.500	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		56.200													
'052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola		56.200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.962	Layanan Umum		479.146													
'051	Layanan umum rumah tangga		479.146	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		38.000													
'051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi		38.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran		5.812.896													
'001	Gaji dan Tunjangan		4.033.534	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.091.103	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	18 UNIT	173.200													
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal		173.200													

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN												
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
'053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		173.200					√								
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	36 ORANG	100.000													
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		100.000													
'053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional		100.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 DOKUMEN	457.166													
2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		105.000													
'052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran		105.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		95.000													
'052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan		95.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		82.400													
'051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan		82.400	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		174.766													
'052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP		15.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		159.766	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



Mengetahui,  
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna  
**Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si**  
 NIP. 19850616 200701 1 003



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346  
WEBSITE: [www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id) EMAIL: [ditiensdkp@kkp.go.id](mailto:ditiensdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bayu Yuniarto Suharto**

Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Tahunana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

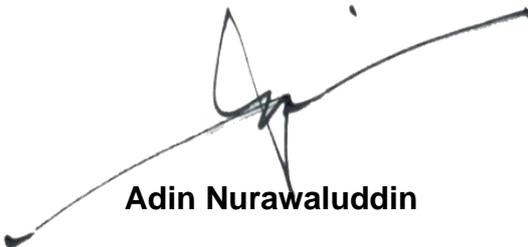
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 17 Januari 2023

**Pihak Kedua**

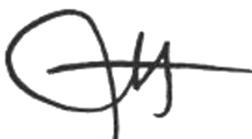
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Adin Nurawaluddin**

**Pihak Pertama**

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Tahunana



**Bayu Yuniarto Suharto**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN PENGAWASAN SDK TAHUNA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
SK1.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas [Indeks]	87,6
		ISK1.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [Indeks]	87,6
SK1.2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.2.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan [%]	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan [%]	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	93
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>				
SK5.1		ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP		(Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	
		ISK5.1.2	Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	75
		ISK5.1.3	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	78
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	90
		ISK5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%]	75
		ISK5.1.7	Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai]	21
		ISK5.1.8	Jumlah inovasi yang dihasilkan [Inovasi]	1
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	92
		ISK5.1.10	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5
		ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	89

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	82

**Data Anggaran :**

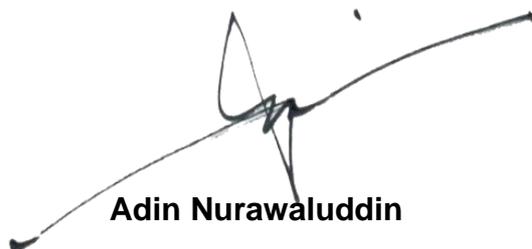
*"bekerja dengan integritas dan totalitas"*

NO	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan</b>	<b>10.702.347.000</b>
SK1.1	<i>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>	<b>593.697.000</b>
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>	<b>250.000.000</b>
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
<b>Kegiatan 4</b>	<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>320.800.000</b>
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas</i>	
SK4.2	<i>Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan</i>	
<b>Kegiatan 5</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>7.519.949.000</b>
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>19.386.793.000</b>

Bandung, 17 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Adin Nurawaluddin**

**Pihak Pertama**

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna



**Bayu Yuniarto Suharto**





